



PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

POHON KINERJA TAHUN 2025



BerAKHLAK **#** bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan • Kuntabel • Kompeten
Harmonis • Ayal • Adaptif • Kolaboratif

TAHAPAN PENJENJANGAN

TAHAP 1 : MENENTUKAN OUTCOME

Dasar Penentuan Outcome		Outcome
1	Tugas dan fungsi yang diemban sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	1 Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan
2	Isu Strategis/Permasalahan yang dihadapi/akan dihadapi	
3	Ekspektasi/harapan masyarakat/stakeholder	2 Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional

TAHAP 2 : IDENTIFIKASI *CRITICAL SUCCESS FACTOR (CFS)* YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENCAPAI KINERJA/OUTCOME STRATEGIS

Outcome		CFS	
1	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan	1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern
		2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
2	Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional		Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

TAHAP 3 : MENGURAIKAN *CRITICAL SUCCESS FACTOR (CFS)* KEPADA KONDISI ANTARA SAMPAI KEPADA KONDISI PALING TEKNIS / OPERASIONAL

Outcome 1 Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan			
CFS		Kondisi Yang Diperlukan	
Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	1	Penyelesaian perkara secara tepat waktu (Tk. Banding dan Tk. Pertama)	
	2	Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju (Tk. Banding)	
	3	Penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak (Tk. Pertama)	
	4	Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan (Tk. Banding dan Tk. Pertama)	

	5	Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative (Tk. Banding dan Tk. Pertama)
	6	Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak (Tk. Pertama)
	7	Pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak (Tk. Pertama)
	8	Perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu) (Tk. Pertama)
	9	layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (eBerpadu) (Tk. Pertama)
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik		Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Outcome 2 Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional		
CFS	Kondisi Yang Diperlukan	
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1	Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
	2	Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
	3	Kinerja Perencanaan Anggaran
	4	Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

TAHAP 4 : MERUMUSKAN INDIKATOR KINERJA

CFS	Kondisi Yang Diperlukan	
Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	a	Penyelesaian perkara secara tepat waktu (Tk. Banding dan Tk. Pertama)
	b	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju (Tk. Banding)

	c	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan (Tk. Banding)
	d	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative (Tk. Banding)
	e	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu (Tk. Pertama)
	f	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak (Tk. Pertama)
	g	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak (Tk. Pertama)
	h	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak (Tk. Pertama)
	i	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan (Tk. Pertama)
	j	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative (Tk. Pertama)
	k	Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu) (Tk. Pertama)
	l	Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (eBerpadu) (Tk. Pertama)
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik		Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
	b	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
	c	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

	d	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan
--	---	---

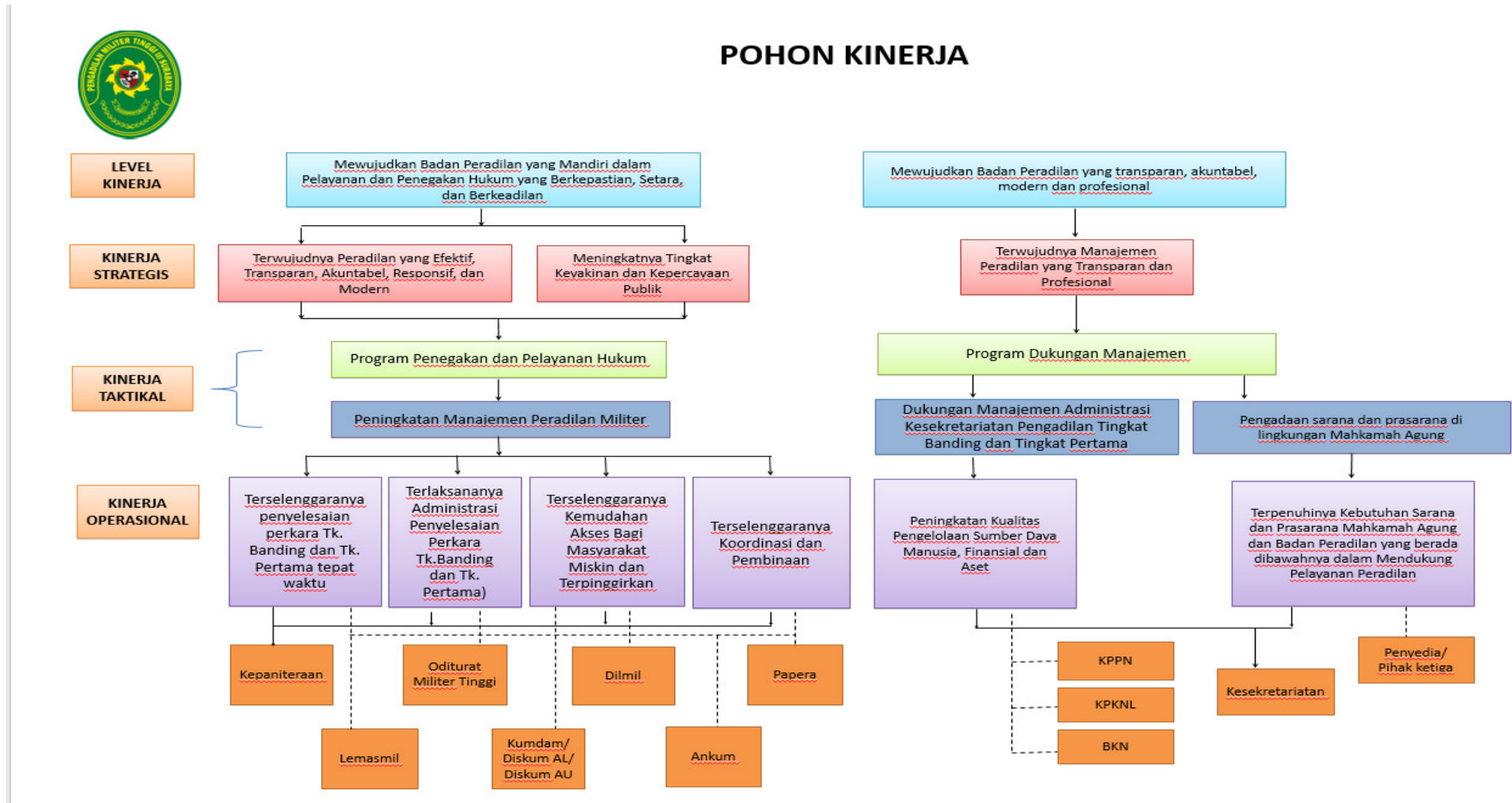


Sidoarjo, November 2025
Kepala Pengadilan Militer Tinggi III

SyF Nursiana, S.H., M.H
Marsekal Pertama TNI

TAHAP 5 : MENERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM KOMPONEN PERENCANAAN DAN KINERJA JABATAN

A. Mengklasifikasi Pohon Kinerja Kepada Level Kinerja



1. Menuangkan Kinerja Strategis sebagai Tujuan dan Sasaran dalam Perencanaan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target				
1	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan	Indeks Efektivitas Layanan Peradilan					
2	Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional	Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan					
No	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	a Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu (Tk. Banding)	92%	94%	94%	94%	95%
		b Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju (Tk. Banding)	100%	100%	100%	100%	100%
		c Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan (Tk. Banding)	85%	85%	86%	86%	86%
		d Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative (Tk. Banding)	0%	20%	20%	21%	22%
		e Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
		f Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu (Tk. Pertama)	83%	85%	85%	86%	86%
		g Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak (Tk. Pertama)	100%	100%	100%	100%	100%
		h Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak (Tk. Pertama)	100%	100%	100%	100%	100%
		i Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan (Tk. Pertama)	85%	85%	86%	86%	86%
		j Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative (Tk. Pertama)	0%	20%	20%	21%	22%
		k Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (eBerpadu) (Tk. Pertama)	75%	75%	76%	76%	76%

		I	Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (eBerpadu) (Tk. Pertama)	75%	75%	76%	76%	76%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik		Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90%	90%	91%	95%	96%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80%	85%	86%	87%	87%
		b	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95%	95%	96%	97%	98%
		c	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75%	80%	81%	82%	83%
		d	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2.3	2.4	2.4	2.4	2.5

2. Menetapkan Kinerja Strategis sebagai Sasaran Program

Nama Program	:	Penegakan dan Pelayanan Hukum
Sasaran Program	:	1 Terwujudnya Penyelesaian Perkara di Dilmilti III Surabaya yang transparan dan modern
	:	2 Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer yang pasti dan berkeadilan
	:	3 Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Militer yang mudah dan terjangkau
	:	4 Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer yang optimal
Indikator Program	:	Jumlah perkara yang diselesaikan
Target Program	:	170 Perkara
Anggaran	:	Rp. 422.331.000,00

Nama Program	:	Dukungan Manajemen
Sasaran Program	:	Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Militer yang Prima dan optimal
Indikator Program	:	1 Layanan sarana dan prasarana
	:	2 Layanan Manajemen Administrasi Kesekretariatan dukungan manajemen internal
Target Program	:	2 Layanan
Anggaran	:	Rp. 9.319.285.000,00

3. Menetapkan Kinerja Taktikal dan Operasional sebagai Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan

Nama Kegiatan	:	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer
Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer
Indikator Kegiatan	:	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Pertama yang diselesaikan tepat waktu
Output	:	Jumlah Perkara Tk. Banding yang diselesaikan tepat waktu
Target Output	:	140 Perkara
Anggaran	:	Rp. 46.058.000,-

Nama Kegiatan	:	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer
Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer
Indikator Kegiatan	:	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Banding yang diselesaikan tepat waktu
Output	:	Jumlah Perkara Tk. Pertama yang diselesaikan tepat waktu
Target Output	:	30 Perkara
Anggaran	:	Rp. 22.403.000,00

Nama Kegiatan	:	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer
Sasaran Kegiatan	:	Terlaksananya Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer
Indikator Kegiatan	:	Jumlah koordinasi percepatan penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer
Output	:	Jumlah pelaksanaan koordinasi
Target Output	:	1 Kegiatan
Anggaran	:	Rp. 12.500.000,00

Nama Kegiatan	:	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer
Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Kemudahan Akses Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Lingkungan Peradilan Militer
Indikator Kegiatan	:	Jumlah perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan Peradilan Militer
Output	:	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung dilingkungan Peradilan Militer
Target Output	:	20 Perkara
Anggaran	:	Rp. 282.650.000,00

Nama Kegiatan	:	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer
Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Koordinasi dan Pembinaan dilingkungan Peradilan Militer
Indikator Kegiatan	:	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan dilingkungan Peradilan Militer
Output	:	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan
Target Output	:	10 Kegiatan
Anggaran	:	Rp. 58.720.000,00

Nama Kegiatan	:	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung (1071)
Sasaran Kegiatan	:	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam Mendukung Pelayanan Peradilan
Indikator Kegiatan	:	Indeks kepuasan layanan sarana dan prasarana Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
Output	:	Jumlah layanan sarana internal
Target Output	:	13 Unit, Set
Anggaran	:	Rp. 94.150.000,00

Nama Kegiatan	:	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (6986)
Sasaran Kegiatan	:	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Finansial dan Aset
Indikator Kegiatan	:	1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
	:	2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
	:	3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
	:	4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan
Output	:	1 Nilai IP ASN Satuan Kerja Pengadilan
	:	2 Nilai IKPA Satuan Kerja Pengadilan
	:	3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
	:	4 Nilai IPA Satuan Kerja Pengadilan
Target Output	:	2 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit
Anggaran	:	Rp 10.635.587.000,00

Sidoarjo, November 2025
Kepala Pengadilan Militer Tinggi III

Syf. Nursiana, S.H.,M.H
Marsekal Pertama TNI

B. Menuangkan Pohon Kinerja ke Komponen Perencanaan dan Kinerja Tiap Level Jabatan



TUJUAN

Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan

Indikator Kinerja :
Indeks Efektivitas Layanan Peradilan

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Indikator Kinerja :

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu (Tk. Banding)
2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan penajau (Tk. Banding)
3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan (Tk. Banding)
4. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative (Tk. Banding)
5. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
6. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu (Tk. Pertama)
7. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak (Tk. Pertama)
8. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak (Tk. Pertama)
9. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan (Tk. Pertama)
10. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative (Tk. Pertama)
11. Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu) (Tk. Pertama)
12. Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (eBerpadu) (Tk. Pertama)

Meningkatnya Tingkat Kevakinan dan Kepercayaan Publik

Indikator Kinerja :
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional

Indikator Kinerja :
Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Indikator Kinerja :

1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
4. Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

SASARAN PROGRAM

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Dukungan Manajemen

SASARAN KEGIATAN

Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung